

PEMBELAJARAN DI SEKOLAH: HARAPAN DAN KENYATAAN

Oleh: Mulyo Prabowo *)

Abstrak

Sekolah merupakan institusi pendidikan yang sudah berabad-abad keberadaannya. Pada mulanya hanya berupa sebuah kegiatan untuk mengisi waktu luang anak-anak para kaum orang kaya jaman romawi. Pada perkembangan sekolah menjadi sebuah lembaga yang dirancang untuk pengajaran siswa (atau "pebelajar") di bawah pengawasan guru. Sebagian besar negara memiliki sistem pendidikan formal, yang umumnya wajib. Sekolah sebagai suatu sistem, mencakup beberapa komponen, dan setiap komponen terdiri dari beberapa faktor. Satu sama lainnya saling terkait sehingga membentuk suatu sistem.

Sistem persekolahan diberbagai negara mempunyai keunikan dan kekhasannya masing-masing, termasuk institusi sekolah di Indonesia. Ekspektasi keluarga, masyarakat, dan negara terhadap institusi sekolah sedemikian besar, yakni membentuk setiap individu menjadi cerdas dan baik.

Sekolah merupakan tumpuan harapan, pada kenyataannya beberapa kebijakan dan permasalahan sekolah sangat kompleks dan rumit, sehingga jauh dari tercapainya harapan tersebut. Untuk perlu pemikiran dan diagnosis yang mendalam serta komprehensif agar institusi sekolah lebih dekat dengan harapan keluarga, masyarakat, dan negara.

Kata Kunci: Pembelajaran, Sekolah, Harapan dan Kenyataan

*) Mulyo Prabowo, M.Pd, Dosen Fakultas Ilmu Pendidikan UNY

Pendahuluan

Persekolahan masih menjadi pilihan di hampir semua Negara, termasuk negara-negara yg tadinya melarang sekolah seperti: China, Kuba. Di jaman Belanda pesantren yg dahulu mengharamkan sekolah sekarang ramai-ramai membangun sekolah.. Pada jaman itu, Muhammadiyah mendirikan sekolah, panti, pko, pandu. Ki Hajar Dewantara menginspirasi pendidikan Muhammadiyah. Ketika di Belanda terjadi gerakan aufklarung, Suwardi Soeryaningrat mendirikan sekolah netral.

Sekolah adalah sebuah lembaga yang dirancang untuk pengajaran siswa (atau "pebelajar") di bawah pengawasan guru. Sebagian besar negara memiliki sistem pendidikan formal, yang umumnya wajib. Nama-nama untuk sekolah-sekolah ini bervariasi menurut negara, tetapi umumnya adalah sekolah dasar untuk anak-anak dan sekolah menengah untuk remaja yang telah menyelesaikan pendidikan dasar dan perguruan tinggi untuk para orang muda yang sudah menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah..

Weber (Jerman) dan Durkheim (Perancis) adalah tokoh-tokoh yang mendasari berdirinya sekolah. Menurut mereka pendidikan adalah untuk menjaga kelangsungan hidup masyarakat kecil atau besar. Pandangan mereka merupakan paham sturktural-fungsional dalam salah satu bukunya On Moral Education menyatakan bahwa, masyarakat itu berkembang karena adanya differensiasi pekerjaan (devisiion of labor), perkembangannya dari mekanik ke organik. Secara bertahap kondisi ini menyebabkan melemahnya konsensus moral di dalam masyarakat, maka untuk dapat bertahan mereka harus terus membangun konsensus tersebut.

Pertanyaannya kemudian adalah: Siapakah yang harus membangun konsensus tersebut? Apakah tugas ini mampu diemban oleh gereja atau keluarga? Jawabannya adalah: Tidak ! Dengan demikian yang harus menjaga konsensus moral tidak lain adalah guru (atas nama negara) melalui sekolah. Ketika masyarakat berkembang, maka konsensus sukar untuk dipertahankan. Peranan guru menjadi sangat sentral dan sekolah merupakan wahana untuk itu. Ada 3 (tiga) hal penting yang merupakan core, yang diperlukan untuk membangun konsensus moral yaitu:

1. Disiplin (orang yang dapat membangun internal moral)
2. Freedom/kebebasan (diberikan ruang untuk bergerak)
3. Tanggungjawab (Suyata, 2010)

Hal di atas banyak dikritik orang dengan argument, bahwa negara dikuasai oleh kelompok tertentu yang mengatasnamakan negara; sedang Guru bekerja atas nama pemerintah dan untuk kepentingan kelompok tertentu. Pada masa lalu di Perancis, terjadi tarik-menarik antara Gereja dan Negara dalam hal pengelolaan sekolah. Ketika persekolahan diserahkan kepada gereja banyak muncul persoalan, Oleh sebab itu, ada asumsi bahwa negara harus ambil bagian atau turut campur dalam masalah persekolahan.

Sejarah persekolahan di Indonesia sudah dimulai sejak jaman penjajahan dengan segala permasalahannya. Sejak Indonesia merdeka, ekspektasi negara, masyarakat, dan keluarga terhadap sekolah sedemikian besar, sehingga setiap pemerintahan di negara ini selalu menjadikan isu pendidikan dan sekolah menjadi isu sentral untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa negara sangat “concern” dalam rangka legitimasi pemerintahannya. Namun demikian, benarkah praktek pembelajaran di sekolah dapat memenuhi harapan negara, masyarakat, maupun keluarga ?

Pengertian dan Status Sekolah di Indonesia

Pada mulanya jaman Yunani Romawi, politik terlalu mendominasi kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.. Semua urusan di Negara itu dilakukan oleh budak, sedang anak-anak orang kaya menganggur. Kondisi ini dianggap berbahaya, sehingga dicarikan upaya untuk mengisi spare time. Para budak membawa mereka mengisi waktu dan mereka disebut gogos dan yg dibawa namanya paes, sedang proses untuk mendidik ini disebut pedagogy (Yunani). Sekolah dimaknai menggunakan waktu luang untuk melakukan sesuatu.

Kata sekolah berasal dari bahasa latin: skhole, scola, scolae atau skhola yang memiliki arti waktu luang atau waktu senggang. Sekolah adalah suatu kegiatan di waktu luang bagi anak-anak ditengah-tengah kegiatan utama mereka, yaitu bermain dan menghabiskan waktu untuk menikmati masa anak-anak dan remaja. Kegiatan dalam waktu luang itu diisi dengan mempelajari cara berhitung, cara membaca huruf dan

mengenal tentang moral (budi pekerti) dan estetika (seni). Untuk mendampingi dalam kegiatan /scola/ anak-anak didampingi oleh orang ahli dan mengerti tentang psikologi anak, sehingga memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada anak untuk menciptakan sendiri dunianya melalui berbagai pelajaran diatas (<http://id.wikipedia.org/wiki/sekolah>).

Saat ini, kata sekolah berubah arti menjadi bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran. Sekolah dipimpin oleh seorang “Kepala Sekolah” Kepala sekolah dibantu oleh wakil kepala sekolah. Kadang bangunan sekolah disusun meninggi dengan memanfaatkan tanah yang tersedia dan dapat diisi dengan fasilitas yang lain. Ketersediaan sarana dalam suatu sekolah mempunyai peran penting dalam terlaksananya proses pendidikan.

Sekolah sebagai suatu sistem, mencakup beberapa komponen, dan setiap komponen terdiri dari beberapa faktor. Satu sama lainnya saling terkait sehingga membentuk suatu sistem. Komponen-komponen sistem sekolah terdiri dari masukan (input), proses (process), keluaran langsung (output) dan keluaran tidak langsung (outcome). Adapun ciri-ciri sistem, sebagai berikut :

- Terdiri dari banyak unsur
- Masing-masing unsure memiliki peran spesifik untuk mendukung fungsi keseluruhan
- Tersusun dalam suatu tatanan tertentu
- Antar masing-masing unsure saling mempengaruhi, saling ketergantungan dan saling berhubungan
- Mempunyai maksud dan tujuan tertentu
- Berproses melakukan transfomasi dengan cara atau mekanisme tertentu
- Memerlukan masukan dari luar atau lingkungan
- Tidak pernah tergiur dari pengaruh lingkungan
- Memiliki mekanisme kontrol untuk menyesuaikan dengan perubahan lingkungan
- Mempunyai batas waktu

Masukan (in put) adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh sistem sekolah untuk menghasilkan keluaran yang diharapkan. Masukan mencakup masukan baku,

instrumental, dan masukan lingkungan. Masukan baku adalah siswa, termasuk karakteristiknya. Masukan instrumental adalah guru, sarana dan prasarana, kurikulum, dana dan pengelolaan sekolah - Masukan lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar lingkup sekolah.

Proses (process) adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh sekolah, termasuk segala proses yang terjadi di dalam sekolah/kelas dalam rangka mengubah masukan untuk menghasilkan pengeluaran yang ditargetkan, proses di sini mencakup kegiatan belajar mengajar, kegiatan pengelolaan sekolah, dan kegiatan administrasi sekolah.

Keluaran Langsung adalah segala sesuatu yang secara langsung dihasilkan oleh sistem pendidikan, mencakup antara lain jumlah tamatan sekolah, dan hasil belajar siswa yang berada dalam bentuk ranah kognitif, afektif, dan keterampilan.

Keluaran Tidak Langsung adalah segala hasil yang diperoleh oleh tamatan di masyarakat sebagai hasil pendidikan, mencakup daya serap lulusan yang memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi serta kesesuaian antara pendidikan dengan pekerjaan.

Menurut statusnya sekolah di Indonesia terbagi dari:

- * Sekolah negeri, yaitu sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah mulai dari sekolah dasar sekolah menengah pertama , sekolah menengah atas dan perguruan tinggi
- * Sekolah swasta, yaitu sekolah yang diselenggarakan oleh lembaga non-pemerintah/swasta, penyelenggara biasanya berupa badan hukum seperti yayasan pendidikan dan sebagainya.

Harapan Terhadap Sekolah

Sekolah diharapkan mampu bertindak sebagai agen masyarakat yang terorganisir untuk mengabadikan pengetahuan, keterampilan, adat istiadat, dan keyakinan masyarakat. Sekolah sebagai bagian dalam transmisi kebudayaan secara terus menerus diperdebatkan, karena perkembangan pengetahuan dan teknologi yang cepat membuatnya tidak mungkin untuk menyampaikan semua informasi. Dipundak pendidikan di sekolah berbeban sebuah harapan mengenai angan-angan masa depan.

Melakukan sosialisasi kepada anak-anak dalam sebuah masyarakat yang mengalami perubahan sangat cepat adalah tantangan yang cukup berat. Dalam kondisi yang berubah, ketika pendidik tidak yakin tentang apa yang harus dipelajari generasi mendatang agar survive dan cukup siap menjelang masa depannya menjadi trend pendidikan untuk beradaptasi. Bagaimana pendidikan beradaptasi? Apakah melibatkan keterampilan dasar mengajar atau pemecahan masalah? Apakah untuk membangun kewirausahaan individual atau kelompok? Sekolah bukan hanya mendorong kreativitas anak muda beradaptasi dengan perubahan fisik dan lingkungan sosialnya, melainkan sekolah masih memiliki tugas untuk mempertahankan status quo dan menjamin kontinuitas budaya. Idealnya, sekolah bertindak sebagai agen untuk mendorong rasa hormat dan kepatuhan pada tatanan sosial yang ada dalam masyarakat, tetapi dalam kenyataannya, hal ini belum tentu demikian (Roberta M. Bern, 2004).

John Goodlad (1984) adalah professor pendidikan yang mempelajari dokumen berkaitan dengan tujuan sekolah selama 300 tahun sejarah persekolahan di AS. Ia mengidentifikasi empat kategori besar tujuan pendidikan di sekolah: (1) akademik (membaca, menulis, berhitung), (2) kejuruan (persiapan dunia kerja); (3) sosial dan kewarganegaraan (persiapan untuk berpartisipasi dalam demokrasi), dan (4) personal (pengembangan bakat individual dan ekspresi diri)

Menurut Suyata (2010), secara khusus sekolah diharapkan berfungsi sebagai berikut:

1. Integrasi nasional/menyatukan bangsa ada banyak faktor yg mempengaruhi seperti keadilan sosial.
2. Membangun karakter bangsa/ warga negara yg baik. Mempunyai karakter, sehingga dengan bangga berani menyatakan we are Indonesians, we are muslims dan sebagainya
3. Membentuk pribadi ideal (pekerja, mandiri, peduli dengan orang lain)
4. Menyiapkan pemimpin di semua sektor dan tingkatan/keluarga
5. Menyiapkan warga negara yang loyal kepada pemerintah yang syah (meski perlu kritikal)

Fungsi tersebut di atas adalah untuk menjaga kelangsungan hidup masyarakat. Perkembangan dalam masyarakat mengakibatkan terjadinya division of labor semacam divisi-divisi, oleh karena itu persatuan bangsa menjadi problematik. Untuk itu perlu dibangun moral yang menyatukan mereka dan tugas itu dibebankan kepada sekolah.

Sekolah diharapkan mampu sebagai agen negara dan para guru sebagai aktor yang akan memelihara konsensus moral bukan lembaga keagamaan maupun keluarga. Hal ini sejalan dengan pemikiran Durkheim (Perancis) yang menyatakan bahwa pendidikan diadakan untuk “*very existence of society*”. Namun demikian, Durkheim juga memperingatkan bahwa seandainya negara dikuasai oleh partai politik tertentu, jangan sampai sekolah menjadi agen dari partai politik tertentu

Sama halnya dengan institusi sekolah di Indonesia juga mengemban fungsi dan tujuan seperti di atas. Perlu dipahami bahwa hampir seluruh kebijakan pendidikan di Indonesia ini merupakan pinjaman (“*policy borrowing*”); yaitu belajar dari luar dan menggunakan untuk membantu memperbaiki situasi di dalam. Dengan demikian, kebijakan pendidikan dapat diambil dari sebagian atau secara menyeluruh dan/atau transplantasi kebijakan persekolahan dari luar. Masalah-masalah yang harus diperhatikan dari kebijakan "meminjam" yaitu dengan identifikasi yang jelas rujukannya, sehingga bisa diambil ciri-ciri pendidikan dari tempat lain menyesuaikan dengan "kebijakan setempat", melalui proses memilah dan memilih "kebijakan ini berasimilasi atau diinternalisasi”.

Kimberly Ochs dan saya telah menyarankan cara-cara untuk mengidentifikasi dan menganalisis asal-usul proses pemberian pinjaman, faktor-faktor yang memicu "cross national attraction" dalam pendidikan. Contoh dari faktor-faktor ini termasuk bentuk penyimpangan sistemik, perubahan ekonomi / kompetisi, kebijakan politik yang berbeda, mengevaluasi pengaruh luar yang negatif, dan ketidakpuasan internal. Faktor-faktor ini penting bagi pembuat kebijakan dalam usaha-usahanya untuk mengidentifikasi fitur sistem lain yang membentuk atau dengan istilah "foci of attraction," mulai dari " filsafat atau ideologi" menjadi "rekayasa" seperti yang diilustrasikan pada (David Phillips, 2002)

Dalam menguji tipologi ini harus melalui penyelidikan yang rinci contohnya sejarah kebijakan Inggris yang telah dipengaruhi oleh kebijakan bidang pendidikan dari Jerman. Kebijakan "meminjam" dapat ditelusuri melalui empat proses utama, yaitu cross-nasional attraction, keputusan, pelaksanaan, dan internalisasi, seperti yang ditunjukkan pada model penggabungan ini melalui proses mengambil atau meminjam sesuai dengan latar belakang sejarah masing-masing negara itu (ibid).

Praktek Pembelajaran di Sekolah

Pembelajaran di sekolah yang menekankan kompetisi ternyata hanya menguntungkan sekelompok kecil segmen dalam masyarakat. Sebagian besar masyarakat yang miskin “*social capital*” tidak dapat minta pertolongan pada sekolah, pada umumnya mereka tidak mampu berkompetisi dan pada akhirnya jadi pecundang. Menurut Prof. Suyata (2010) pakar pendidikan dan persekolahan menyatakan ada dua jenis orientasi sekolah sebagai berikut:

1. Academic oriented (outward looking) yakni being smart
2. Developmental oriented (inward looking), being good

Perdebatan di banyak negara, termasuk Indonesia adalah sekolah ini berorientasi pada siswa (pebelajar) menjadi individu yang cerdas (being good) seperti: terampil, atau individu yang baik (being good) seperti: jujur, saleh, sopan dan sebagainya. Pada umumnya, semua berharap “*being smart and being good*” bukan “*being smart or being good*”. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah kebijakan persekolahan selama ini mendukung tercapainya harapan tersebut ?

Sebagai suatu sistem institusi sekolah selama ini banyak kelemahannya. Pada umumnya kegiatan pembelajaran didominasi guru dan buku untuk menyampaikan pengetahuan yang ada di buku dan dikuasai guru. Pembelajaran di sekolah kurang memperhatikan dan menghargai pengetahuan yang dimiliki siswa dari pengalaman hidup sehari-hari di luar sekolah. Kondisi ini menyebabkan belajar di sekolah menjadi tidak kreatif, terasa kering dari keterlibatan perasaan dan emosi, tidak orisinal dan cenderung bersifat artificial dan penuh keterpaksaan (Sodiq A. Kuntoro, 2007).

Belajar sekedar mengumpulkan pengetahuan yang disampaikan oleh guru pada siswa, dan menggunakan pengetahuan sekedar untuk menjawab ujian yang diselenggarakan oleh sekolah maupun negara, adalah menjauhkan makna belajar bagi kehidupan. Pada umumnya pembelajaran di sekolah berbasis belajar dalam kelas, yang mengutamakan belajar dari buku dan guru menyebabkan belajar tidak hidup, belajar yang tidak diarahkan oleh diri sendiri. Belajar semacam ini sering dikritik model pendidikan gaya bank (Freire, 1977) yang mendorong terbentuknya sikap ketertindasan, dan hancurnya

keberanian mengambil inisiatif untuk melakukan perubahan serta kemerdekaan dan kemandirian dalam tindakan.

Secara khusus di Indonesia, praktek pembelajaran di sekolah dari tingkat dasar, menengah dan atas masih seperti yang diuraikan di atas. Hal ini masih diperparah dengan kebijakan Ujian Akhir Nasional (UAN) untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara nasional. Kebijakan ini seandainya dilaksanakan dalam rangka pemetaan kondisi persekolahan antar daerah dan propinsi sebenarnya amat berguna bahan untuk diagnosis untuk memecahkan persoalan pendidikan dan persekolahan di Indonesia akan tetapi kebijakan ini menjadi sangat naïf karena dipakai untuk mengukur standar kualitas pendidikan secara nasional.

Kebijakan UAN sebenarnya sudah menjadi pilihan bahwa orientasi sekolah adalah “*being smart*”, karena yang diukur kognitif semata. Menjadi lebih aneh ketika usulan pendidikan agama dijadikan salah satu mata pelajaran yang di UAN-kan. Bagaimana mungkin afeksi keimanan setiap siswa (pebelajar) akan diukur dengan ujian tulis yang berlangsung sekitar dua jam ? Hal ini dilakukan dalam rangka memenuhi harapan agar sekolah mampu membentuk para siswa (pebelajar) menjadi individu yang cerdas sekaligus baik (*being smart and being good*). Banyak kebijakan di bidang pendidikan dan persekolahan yang “aneh tapi nyata”. Prof. Suyata (2010) dalam kuliahnya di Pascasarjana sering melontarkan bahwa pendidikan dan persekolahan di Indonesia ini berjalan tanpa teori. Lebih lanjut dikatakan bahwa sumber kegagalan mayoritas anak di Indonesia adalah sekolah.

Sedemikian besar harapan keluarga, masyarakat dan negara terhadap sekolah bisa menjadi obat mujarab terhadap ketidakadilan sosial, ekonomi di negara ini. Akan tetapi pada kenyataannya masalah persekolahan di negeri ini kompleks dan rumit, banyak kebijakan pendidikan dan persekolahan yang mengandung dan mengundang persoalan baru yang jauh dari harapan. Wajib belajar merupakan kebijakan yang memberi “kesempatan yang sama” untuk bersekolah, tetapi kebijakan ini tidak menjamin “kesempatan menjadi sama”. Persoalan sekolah yang kompleks dan rumit ini harus dipecahkan melalui pemikiran dan diagnosis yang mendalam, serta penelitian yang komprehensif, agar institusi sekolah tidak terjerumus menjadi institusi pembodohan massal.

Daftar Pustaka

- Altbach, Philip G., Arnove, Robert F., Kelly, Gail P. 1982. *Comparative Education*. New York: Macmillan Publishing Co., Inc.
- Bern, Roberta M. 2004. *Child, Family, School, Community*. Australia: Thomson - Wadsworth
- Glasser, William, M.D. 1992. *The Quality School: Managing Students Without Coersion*. New York: HarperCollins Publishers, Inc.
- Goodlad, John I. 1984. *A Place Called School: Prospects for The Future*. New York: McGraw-Hill Book Company.
- Sodiq A. Kuntoro, Prof., Dr., M.Ed. 2007. *Dinamika Belajar Informal dan Implikasi Edukatif di Sekolah*. Yogyakarta: FIP UNY.